

**RENJA**  
**KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN BANGSAL**  
**TAHUN 2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Bangsal merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Bangsal yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Bangsal adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

#### a. Persiapan penyusunan Renja SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renja antara lain pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi.

#### b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD

##### 1. Tahap perumusan rancangan Renja

Perumusan rancangan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD, serta penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

## 2. Tahap penyajian rancangan Renja

Penyajian rancangan Renja dapat disusun menurut sistematika yang ada.

### c. Pelaksanaan forum SKPD

Forum SKPD merupakan wadah penampung dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD.

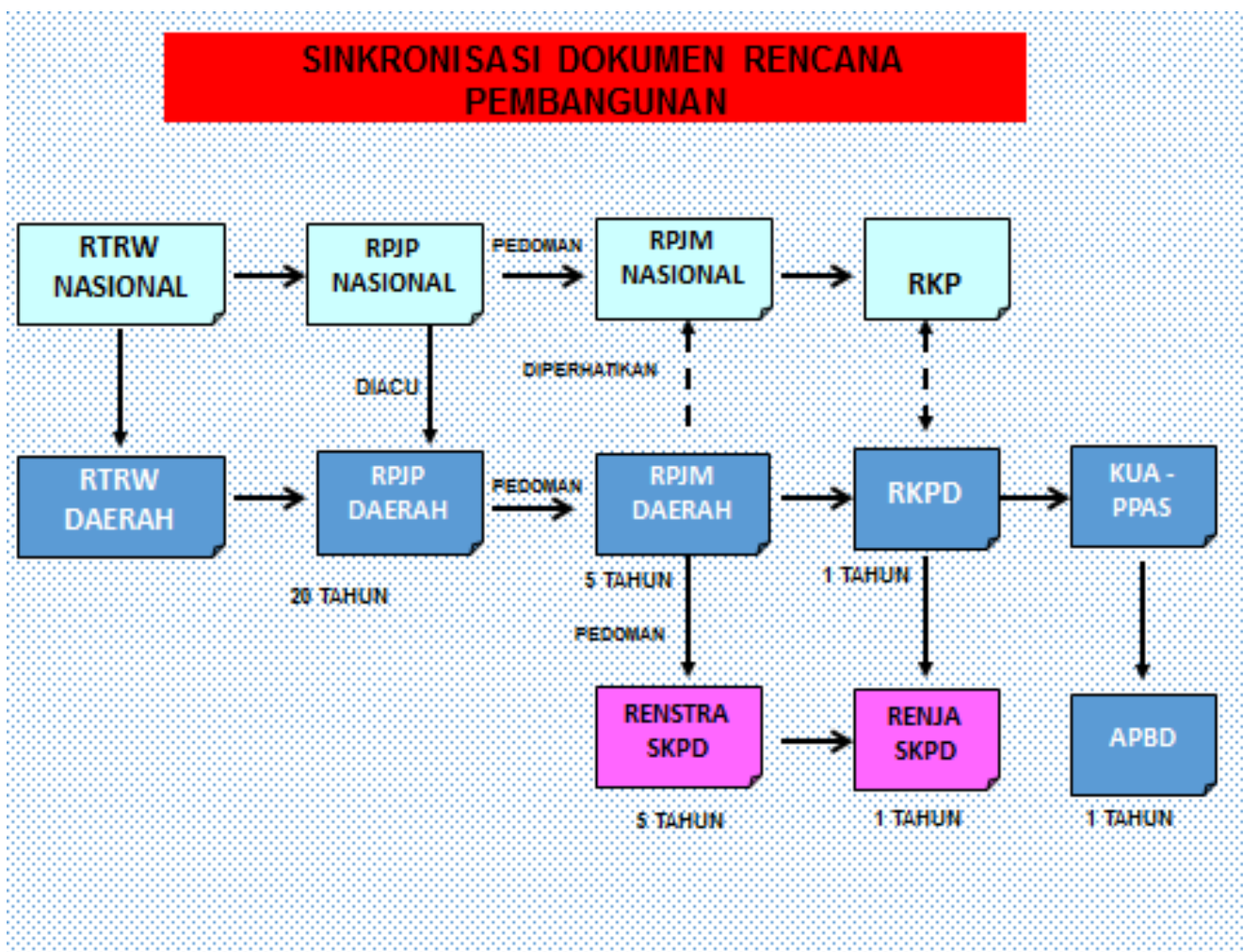
### d. Penetapan Renja SKPD

Penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran tersebut.

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja Provinsi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen  
RKPD



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Bangsal yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Bangsal.

RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Kegiatan awal penyusunan Rancangan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka Pemerintah Daerah menyusun PPAS dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Dari KUA dan PPAS yang telah disusun akan diperoleh nota kesepakan yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) memuat tentang aktivitas dalam penyusunan APBD. RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah sehingga sifatnya adalah usulan dengan menggunakan PPAS sebagai acuannya. Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya dievaluasi dan diseleksi menjadi RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
  - 14) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
  - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
- 29) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

## **1.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Bangsal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

## **1.2 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Bangsal ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Kecamatan Bangsal dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian

Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat



Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## BAB V PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Bangsal pada tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 sedangkan untuk program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan pada table 2.2 berikut :

**TABEL 2.1**  
**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KECAMATAN BANGSAL 2020**

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	%	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.000.000	42.867.895	91,21%
		2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.500.000	2.500.000	100,00%
		3	Penyediaan alat tulis kantor	24.671.154	24.671.000	100,00%
		4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.600.000	17.600.000	100,00%
		5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	100,00%

		6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	120.750.000	120.750.000	100,00%
		7	Penyediaan makanan dan minuman	24.600.000	24.600.000	100,00%
		8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	25.000.000	25.000.000	100,00%
		9	Penyediaan Jasa tenaga Kerja	13.404.480	12.981.576	96,85%
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	10	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	19.500.000	19.500.000	100,00%
		11	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	30.000.000	30.000.000	100,00%
		12	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	4.500.000	4.500.000	100,00%
3	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	13	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	11.772.000	11.772.000	100,00%
4	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan</b>	14	Penunjang PATEN	34.000.000	31.750.000	93,38%
		15	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Keliurahan	9.000.000	9.000.000	100,00%
		16	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan	9.590.000	9.590.000	100,00%
		17	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	134.070.500	132.324.100	98,70%
		18	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	70.000.000	70.000.000	100,00%
<b>JUMLAH</b>				<b>605.958.134</b>	<b>597.406.571</b>	<b>98,59%</b>

TABEL 2. 2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2021

BULAN JANUARI - MEI

No. Urut	Kode	Uraian	Realisasi						Total Realisasi Januari-Mei	(Rp.)	KEU	FISIK	Ket
			(Rp)	Januari	Februari	Maret	April	Mei					
1	2	3	4	6	7		8	8	9	11	12	13	
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>											
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	468.500,00	0,00	538.050,00	0,00	1.006.550,00	1.993.450,00	33,55%	33,55%	
2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	1.129.150,00	0,00	1.413.500,00	0,00	2.542.650,00	2.457.350,00	50,85%	50,85%	
	7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>											
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.234.666.373,00	110.417.724,00	115.178.040,00	253.614.735,00	176.974.353,00	310.455.392,00	966.640.244,00	2.268.026.129,00	29,88%	29,88%	
4	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	0,00	1.771.000,00	671.000,00	1.711.000,00	1.651.000,00	5.804.000,00	4.196.000,00	58,04%		
	7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>											
5	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00%	0,00%	
	7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>											
6	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorW	10.000.000,00	0,00	1.537.700,00	922.650,00	0,00	1.262.900,00	3.723.250,00	6.276.750,00	37,23%	37,23%	
7	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	1.605.000,00	2.250.000,00	6.900.000,00	93.100.000,00	6,90%	6,90%	
8	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	0,00	1.799.600,00	1.357.500,00	1.565.300,00	825.000,00	5.547.400,00	6.452.600,00	46,23%	46,23%	
9	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.938.294,00	0,00	3.288.400,00	1.421.500,00	2.628.500,00	0,00	7.338.400,00	12.599.894,00	36,81%	36,81%	
10	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	0,00	1.604.450,00	1.388.000,00	2.559.000,00	1.524.500,00	7.075.950,00	12.924.050,00	35,38%	35,38%	

11	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	0,00	2.058.000,00	3.417.000,00	2.957.000,00	1.898.000,00	10.330.000,00	14.670.000,00	41,32%	41,32%	
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
12	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	2.039.032,00	3.689.133,00	2.902.880,00	2.898.230,00	2.901.707,00	14.430.982,00	20.569.018,00	41,23%	41,23%	
13	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.000.000,00	0,00	9.951.120,00	3.351.120,00	6.651.120,00	6.651.120,00	26.604.480,00	42.395.520,00	38,56%	38,56%	
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
14	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000,00	0,00	1.910.100,00	2.070.000,00	3.380.400,00	1.035.000,00	8.395.500,00	29.104.500,00	22,39%	22,39%	
15	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,00	2.469.800,00	771.850,00	8.953.450,00	4.219.800,00	16.414.900,00	13.585.100,00	54,72%	54,72%	
16	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	1.548.500,00	1.057.000,00	0,00	2.605.500,00	12.394.500,00	17,37%	17,37%	
II	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											
	<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>											
17	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.000.000,00	0,00	938.400,00	647.000,00	0,00	911.000,00	2.496.400,00	7.503.600,00	24,96%	24,96%	
18	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000,00	0,00	621.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00	18.358.000,00	8,21%	8,21%	
III	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	105.000.000,00	0,00	13.811.400,00	6.937.500,00	800.000,00	4.104.500,00	25.653.400,00	79.346.600,00	24,43%	24,43%	

	<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	105.000.000,00	0,00	13.811.400,00	6.937.500,00	800.000,00	4.104.500,00	25.653.400,00	<b>79.346.600,00</b>			
19	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<b>50.000.000,00</b>	0,00	0,00	2.166.500,00	320.000,00	1.641.000,00	4.127.500,00	<b>45.872.500,00</b>	8,26%	8,26%	
20	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>55.000.000,00</b>	0,00	13.811.400,00	4.771.000,00	480.000,00	2.463.500,00	21.525.900,00	<b>33.474.100,00</b>	39,14%	39,14%	
IV	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											
	<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>											
21	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>40.000.000,00</b>	0,00	0,00	1.773.500,00	2.551.000,00	8.790.000,00	13.114.500,00	<b>26.885.500,00</b>	32,79%	32,79%	
22	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<b>10.000.000,00</b>	0,00	0,00	913.500,00	0,00	1.775.500,00	2.689.000,00	<b>7.311.000,00</b>	26,89%	26,89%	
V	<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>											
	<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											
23	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<b>14.000.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	2.421.500,00	1.585.000,00	4.006.500,00	<b>9.993.500,00</b>	28,62%	28,62%	
24	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>19.000.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	2.161.500,00	2.315.000,00	4.476.500,00	<b>14.523.500,00</b>	23,56%	23,56%	
25	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<b>4.000.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000.000,00</b>	0,00%	0,00%	
26	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>10.000.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	4.431.000,00	1.121.000,00	5.552.000,00	<b>4.448.000,00</b>	55,52%	55,52%	

		dengan Pembangunan Desa											
27	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.000.000,00	0,00	2.057.500,00	1.171.000,00	800.000,00	450.000,00	4.478.500,00	8.521.500,00	34,45%	34,45%	
	<b>JUMLAH</b>		<b>3.883.104.667,00</b>	<b>112.456.756,00</b>	<b>164.283.293,00</b>	<b>288.945.235,00</b>	<b>228.056.903,00</b>	<b>355.726.419,00</b>	<b>1.149.468.606,00</b>	<b>2.733.636.061,00</b>	<b>29,60%</b>	<b>29,60%</b>	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2021  
BULAN JUNI - AGUSTUS**

No. Urut	Kode Rekening Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	KONTRAK	Realisasi			SISA	PRESENTASE (%)		Ket
			(Rp)	(Rp)	Juni	Juli	Agustus		Total Realisasi Januari-Agustus	(Rp.)	
1	2	3	4		8	8	8	9	11	12	13
1	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
	7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>									
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00		0,00	636.550,00	0,00	1.643.100,00	1.356.900,00	54,77%	54,77%
2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00		0,00	843.050,00	0,00	3.385.700,00	1.614.300,00	67,71%	67,71%
	7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>									
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.234.666.373,00		284.838.302,00	171.812.010,00	104.164.268,00	1.527.454.824,00	1.707.211.549,00	47,22%	47,22%
4	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00		0,00	1.611.000,00	480.000,00	7.895.000,00	2.105.000,00	78,95%	78,95%
	7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>									
5	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	12.000.000,00		11.913.000,00	0,00	0,00	11.913.000,00	87.000,00	99,28%	99,28%





17	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.000.000,00		0,00	755.000,00	1.500.000,00	4.751.400,00	5.248.600,00	47,51%	47,51%
18	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000,00		0,00	0,00	2.071.000,00	3.713.000,00	16.287.000,00	18,57%	18,57%
III	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>									
	7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>									
19	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	48.880.000,00	30.796.000,00	0,00	880.000,00	1.371.000,00	37.174.500,00	11.705.500,00	76,05%	76,05%
20	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.760.000,00		0,00	0,00	0,00	21.525.900,00	31.234.100,00	40,80%	40,80%
IV	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									
	7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>									
21	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00		800.000,00	1.521.000,00	8.356.500,00	23.792.000,00	16.208.000,00	59,48%	59,48%
22	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00		0,00	0,00	5.023.000,00	7.712.000,00	2.288.000,00	77,12%	77,12%
V	7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>									
	7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									
23	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.520.000,00		0,00	0,00	4.933.450,00	8.939.950,00	2.580.050,00	77,60%	77,60%
24	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.200.000,00		0,00	0,00	4.265.000,00	8.741.500,00	5.458.500,00	61,56%	61,56%

25	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<b>4.000.000,00</b>		0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	<b>805.000,00</b>	79,88%	79,88%	
26	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<b>10.000.000,00</b>		0,00	0,00	4.445.200,00	9.997.200,00	<b>2.800,00</b>	99,97%	99,97%	
27	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>10.600.000,00</b>		0,00	0,00	450.000,00	4.928.500,00	<b>5.671.500,00</b>	46,50%	46,50%	
	<b>JUMLAH</b>		<b>3.864.088.667,00</b>		<b>336.023.414,00</b>	<b>223.060.021,00</b>	<b>204.791.890,00</b>	<b>1.944.139.931,00</b>	<b>1.919.948.736,00</b>	<b>50,31%</b>	<b>50,31%</b>	

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.3 (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.3 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bangsal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.4.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		90,87%	78%	76%	97%			93%
4.01.4.01.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98%			98%
4.01.4.01.1.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan /perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional		2 Kendaraan	2 Unit	2 Unit	100%			100%
4.01.4.01.14.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%			100%
4.01.4.01.14.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dll		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%			100%
4.01.4.01.14.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%			100%

4.01.4.01.14.01.1 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%			100%
4.01.4.01.14.01.1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			100%
4.01.4.01.14.01.2 1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			100%
4.01.4.01.14.01.2 3	Penyediaan Jasa Tenaga kerja	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan		2 THL	1 THL	1 THL	98%			98%
<b>4.01.4.01.14.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Indeks Kepuasan ASN</b>		<b>78 Indeks</b>						<b>78 Indeks</b>
		<b>Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi Layak Fungsi</b>			<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>
4.01.4.01.14.02.2 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan Presenn berfungsi dengan baik		3 Gedung	3 Unit	3 Unit	100%			100%
4.01.4.01.14.02.2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%			100%
4.01.4.01.14.02.2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%			100%
<b>4.01.4.01.14.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Indeks Kepuasan ASN</b>		<b>78 Indeks</b>						<b>78 Indeks</b>
4.01.4.01.14.03.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Dapat Tercukupi		32 Stel						32 Stel
<b>4.01.4.01.14.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja kecamatan yang disusun</b>			<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>

	<b>capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>								
4.01.4.01.14.06.05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			10 Dokumen	10 Dokuemen	100%			100%
<b>4.01.4.01.14.56</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan</b>	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu			<b>79%</b>	<b>81%</b>	102%			102%
4.01.4.01.14.56.01	Penunjang PATEN	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1300 Pelayanan	1300 Pelayanan	100%			100%
4.01.4.01.14.56.02	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa			50 Pembinaan	50 Pembinaan	100%			100%
4.01.4.01.14.56.03	Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat			14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%			100%
4.01.4.01.14.56.04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat			40 Kegiatan	40 Kegiatan	100%			100%
4.01.4.01.14.56.05	Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu			6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%			100%
<b>7.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>75</b>					<b>74</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	5 Dokumen					5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	8 Dokumen					8 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Dokumen					14 Bulan	11 Bulan	11 Bulan
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Keuangan bulanan	30 Dokumen					12 Bulan	9 Bulan	9 Bulan
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	30 Stel					30 Stel	30 Stel	30 Stel
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket					1 Paket	1 Paket	1 Paket
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket					1 Paket	1 Paket	1 Paket
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	-					-	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 Paket					1 Paket	1 Paket	1 Paket
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	-					-	-	-

	Perundang-Undangan	disediakan								
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket					1 Paket	1 Paket	1 Paket
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Fasilitasi Makan dan Minum Tamu	12 Bulan					12 Bulan	9 Bulan	9 Bulan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan					12 Bulan	9 Bulan	9 Bulan
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan					12 Bulan	9 Bulan	9 Bulan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	3 THL					12 Bulan	9 Bulan	9 Bulan
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	3 Unit					3 Unit	2 Unit	2 Unit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 Unit					3 unit	2 Unit	2 Unit
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 Paket					1 Paket	1 Paket	1 Paket



7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%					80%	65%	65%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	80%					80%	65%	65%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	550 Pelayanan					550 Pelayanan	225 Pelayanan	225 Pelayanan
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	550 pelayanan					550 Pelayanan	400 Pelayanan	400 Pelayanan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Kemasyarakatan	81%					81,00%	72%	72%
7.01.02.2.01	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Kemasyarakatan	81%					81,00%	72%	72%
7.01.02.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Koordinasi					12 koordinasi	10 Koordinasi	10 Koordinasi
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4 Pembinaan					4 pembinaan	2 Pembinaan	2 Pembinaan

7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,00%					81,00%	60%	60%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,00%					81,00%	60%	60%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 kegiatan					6 kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 kegiatan					2 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	80%					80%	75%	75%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	17 Fasilitasi					17 Fasilitasi	14 Fasilitasi	14 Fasilitasi
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	17 Fasilitasi					17 Fasilitasi	14 Fasilitasi	14 Fasilitasi

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Fasilitasi					17 Fasilitasi	14 Fasilitasi	14 Fasilitasi
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-					-	-	-
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-					-	-	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Fasilitasi					17 Fasilitasi	17 Fasilitasi	17 Fasilitasi
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-					-	-	-
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaab Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 Fasilitasi					17 Fasilitasi	10 Fasilitasi	10 Fasilitasi

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capaian indikator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bangsal

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	
			TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	IKM Kecamatan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan

Bangsas Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.5 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)**  
**Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bangsal**  
**Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021(n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan							78				Baik
2	Persentase Peningkatan Intensifikasi PBB			1,5%				3%	1%			Baik
3	Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai SP			79%					79%			Baik
4	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Dalam Satu Tahun, Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat			79%	80%				79%	80%		Baik
5	Presentase Indikator Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai				80%					80%		Baik
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				75	80.5	81				75	Sangat Baik
7	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan				80%	81%	82%			80%	81%	Baik
8	Presentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				80%	81%	82%			80%	81%	Baik

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Bangsal diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

#### a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Bangsal

#### - Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Bangsal bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Bangsal yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Bangsal;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

#### - Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Bangsal namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
8. Pelayanan yang Kurang Optimal di Masa Pandemi Covid-19.
9. Peningkatan Kinerja melalui Inovasi dan Penerapan E-Office

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Bangsal yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Bangsal untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.



## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.6 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.6 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)  
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto**

NO	Rancangan Awal RKPDP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80.5</b>	<b>Rp3.627.104.667</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80.5</b>	<b>Rp3.485.543.125</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Presentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>81%</b>	<b>Rp8.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Presentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>81%</b>	<b>Rp15.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dapat Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku	7 Dokumen	Rp4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dapat Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku	7 Dokumen	Rp7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dapat Tersusun	8 Dokumen	Rp4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dapat Tersusun	8 Dokumen	Rp7.500.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>81%</b>	<b>Rp3.244.174.667</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>81%</b>	<b>Rp2.806.105.125</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 dokumen	Rp3.234.666.667	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 dokumen	Rp2.806.105.125	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	5 dokumen	Rp9.508.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	5 dokumen	Rp0	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>77,46</b>	<b>Rp15.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>77,46</b>	<b>Rp0</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Bangsal	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya	30 stel	Rp15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Bangsal	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya	-	Rp0	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>81%</b>	<b>Rp181.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>81%</b>	<b>Rp130.508.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	Rp10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	Rp10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	Rp25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	Rp25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Kertas	1 paket	Rp12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Kertas	1 paket	Rp12.000.000	

			Kop, Lembar Disposisi, dan Foto copy					Kop, Lembar Disposisi, dan Foto copy		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	Rp4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	Rp4.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint, Map, dll	1 paket	Rp20.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint, Map, dll	1 paket	Rp29.508.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bangsal	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Rp20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bangsal	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Rp20.000.000	
<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Kec. Bangsal	<b>Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp0</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Kec. Bangsal	<b>Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Rp355.000.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	Kec. Bangsal	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dapat terpenuhi	-	Rp0	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	Kec. Bangsal	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dapat terpenuhi	10 unit	Rp355.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Bangsal	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>81%</b>	<b>Rp91.430.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Bangsal	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>81%</b>	<b>Rp91.430.000</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bangsal	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp38.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bangsal	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Rp38.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Tenaga Kerja Pelayanan Umum Kantor sesuai Kebutuhan	3 orang	Rp53.430.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Tenaga Kerja Pelayanan Umum Kantor sesuai Kebutuhan	3 orang	Rp53.430.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Bangsal	<b>Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>81%</b>	<b>Rp87.500.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec. Bangsal	<b>Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>81%</b>	<b>Rp87.500.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bangsal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Penyediaan BBM, Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Rutin Lainnya dan Pajak Kendaraan	2 unit	Rp37.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bangsal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Penyediaan BBM, Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Rutin Lainnya dan Pajak Kendaraan	2 unit	Rp37.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bangsal	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan Berfungsi dengan Baik	3 unit	Rp30.000.000			Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan Berfungsi dengan Baik	3 unit	Rp30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 paket	Rp20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bangsal	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 paket	Rp20.000.000	
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kec. Bangsal	<b>Presentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>Rp24.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kec. Bangsal	<b>Presentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>Rp24.000.000</b>	
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Bangsal	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terlayani sesuai</b>	<b>1100 pelayanan</b>	<b>Rp24.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Bangsal	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terlayani sesuai</b>	<b>1100 pelayanan</b>	<b>Rp24.000.000</b>	

			<b>Standar Pelayanan</b>					<b>Standar Pelayanan</b>			
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bangsal	Jumlah Pelayanan Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 pelayanan	Rp12.000.000	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bangsal	Jumlah Pelayanan Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 pelayanan	Rp12.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bangsal	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 pelayanan	Rp12.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bangsal	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 pelayanan	Rp12.000.000	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Presentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>	<b>Rp232.000.000</b>			<b>Presentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>	<b>Rp222.500.000</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>49 fasilitasi</b>	<b>Rp232.000.000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>49 fasilitasi</b>	<b>Rp222.500.000</b>	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Fasilitasi	Rp27.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Fasilitasi	Rp17.500.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Fasilitasi	Rp37.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Fasilitasi	Rp37.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangsal	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8 Fasilitasi	Rp60.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangsal	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8 Fasilitasi	Rp60.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bangsal	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17 Fasilitasi	Rp108.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bangsal	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17 Fasilitasi	Rp108.000.000	
					<b>Rp3.883.104.667</b>					<b>Rp3.732.043.125</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Bangsal melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Bangsal secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.7 (T-C 32) berikut :

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Nama OPD : Kecamatan Bangsal**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>				

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bangsal ditujukan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Sasaran Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kecamatan	77	78	79	80	81	82
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	61	62	63	64	65
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	77	78	79	80	81	82

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bangsal Tahun 2022 mengacu pada Tujuan Kecamatan Bangsal yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsal untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Perkiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Mojokerto  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bangsal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>								
	<b>Bidang Administrasi Pemerintahan</b>								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	77	Rp3.485.543.125	APBD Kab.		81	Rp3.990.191.010
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Bangsal	81%	Rp15.000.000	APBD Kab.		82%	Rp8.800.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dapat Tersusun Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Kec. Bangsal	7 Dokumen	Rp7.500.000	APBD Kab.		7 Dokumen	Rp4.400.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dapat Tersusun	Kec. Bangsal	8 Dokumen	Rp7.500.000	APBD Kab.		8 Dokumen	Rp4.400.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Kec. Bangsal	Rp2.806.105.125	APBD Kab.		82%	Rp3.568.968.010
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bangsal	24 dokumen	Rp2.806.105.125	APBD Kab.		24 dokumen	Rp3.558.133.010
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	Kec. Bangsal	5 dokumen	Rp0	APBD Kab.		5 dokumen	Rp10.835.000

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	Kec. Bangsal	77,46	Rp0	APBD Kab.		77,96	Rp16.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya	Kec. Bangsal	-	Rp0	APBD Kab.		30 stel	Rp16.500.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>Kec. Bangsal I</b>	81%	<b>Rp130.508.000</b>	<b>APBD Kab.</b>		82%	<b>Rp199.100.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bangsal	1 paket	Rp10.000.000	APBD Kab.		1 paket	Rp11.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bangsal	1 paket	Rp30.000.000	APBD Kab.		1 paket	Rp99.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bangsal	12 bulan	Rp25.000.000	APBD Kab.		12 bulan	Rp27.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Kertas Kop, Lembar Disposisi, dan Foto copy	Kec. Bangsal	1 paket	Rp12.000.000	APBD Kab.		1 paket	Rp13.200.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Bangsal	1 paket	Rp4.000.000	APBD Kab.		1 paket	Rp4.400.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint, Map, dll	Kec. Bangsal	1 paket	Rp29.508.000	APBD Kab.		1 paket	Rp22.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bangsal	12 bulan	Rp20.000.000	APBD Kab.		12 bulan	Rp22.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kec. Bangsal I</b>	100%	<b>Rp355.000.000</b>	<b>APBD Kab.</b>		-	<b>Rp0</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dapat terpenuhi	Kec. Bangsal	10 unit	Rp355.000.000	APBD Kab.		-	Rp0
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>Kec. Bangsal I</b>	81%	<b>Rp91.430.000</b>	<b>APBD Kab.</b>		82%	<b>Rp100.573.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bangsal	12 bulan	Rp38.000.000	APBD Kab.		12 bulan	Rp41.800.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Pelayanan Umum Kantor sesuai Kebutuhan	Kec. Bangsal	3 orang	Rp53.430.000	APBD Kab.		3 orang	Rp58.773.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>Kec. Bangsal I</b>	81%	<b>Rp87.500.000</b>	<b>APBD Kab.</b>		81%	<b>Rp96.250.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Penyediaan BBM, Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Rutin Lainnya dan Pajak Kendaraan	Kec. Bangsal	2 unit	Rp37.500.000	APBD Kab.		2 unit	Rp41.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan Berfungsi dengan Baik	Kec. Bangsal	3 unit	Rp30.000.000	APBD Kab.		3 unit	Rp33.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Bangsal	1 paket	Rp20.000.000	APBD Kab.		1 paket	Rp22.000.000
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Presentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar</b>	<b>Kec. Bangsal I</b>	81%	<b>Rp24.000.000</b>	<b>APBD Kab.</b>		82%	<b>Rp26.400.000</b>



		<b>Pelayanan</b>							
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>Kec. Bangsa I</b>	<b>1100 pelayanan</b>	<b>Rp24.000.000</b>	<b>APBD Kab.</b>		<b>1100 Pelayanan</b>	<b>Rp26.400.000</b>
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Bangsal	550 pelayanan	Rp12.000.000	APBD Kab.		550 pelayanan	Rp13.200.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Bangsal	550 pelayanan	Rp12.000.000	APBD Kab.		550 pelayanan	Rp13.200.000
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Presentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Bangsa I</b>	<b>81%</b>	<b>Rp222.500.000</b>	<b>APBD Kab.</b>		<b>82%</b>	<b>Rp238.075.000</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Kec. Bangsa I</b>	<b>49 fasilitasi</b>	<b>Rp222.500.000</b>	<b>APBD Kab.</b>		<b>49 fasilitasi</b>	<b>Rp238.075.000</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	17 Fasilitasi	Rp17.500.000	APBD Kab.		17 Fasilitasi	Rp18.725.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bangsal	17 Fasilitasi	Rp37.000.000	APBD Kab.		17 Fasilitasi	Rp39.590.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangsal	8 Fasilitasi	Rp60.000.000	APBD Kab.		8 Fasilitasi	Rp64.200.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bangsal	17 Fasilitasi	Rp108.000.000	APBD Kab.		17 Fasilitasi	Rp115.560.000
	<b>TOTAL</b>				<b>Rp3.732.043.125</b>				<b>Rp4.228.266.010</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1**  
**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022**  
**KECAMATAN BANGSAL**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

Kode SKPD		KECAMATAN BANGSAL												
NAMA SKPD		KECAMATAN BANGSAL												
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp.)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME				SKPD Terkait	PAGU (Rp)	KL	Rp.	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	L		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	Kec. Bangsal	Rp 3.485.543.125	-	0	-	0	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	L	Presentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		81%	Kec. Bangsal	Rp 15.000.000	-	0	-	0	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku		7 Dokumen	Kec. Bangsal	Rp 7.500.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		8 Dokumen	Kec. Bangsal	Rp 7.500.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	L	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		81%	Kec. Bangsal	Rp 2.806.105.125	-	0	-	0	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-		Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		24 dokumen	Kec. Bangsal	Rp 2.806.105.125					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		Jumlah laporan keuangan bulanan		5 dokumen	Kec. Bangsal	Rp -					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	L	IP ASN Perangkat Daerah		70	Kec. Bangsal	Rp -	-	0	-	0	-

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		-	Kec. Bangsal	Rp -					
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	<b>L</b>	<b>Presentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan</b>		<b>81%</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Rp 130.508.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 paket	Kec. Bangsal	Rp 10.000.000					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 paket	Kec. Bangsal	Rp 30.000.000					
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	-		Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	Kec. Bangsal	Rp 25.000.000					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy		1 paket	Kec. Bangsal	Rp 12.000.000					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-		Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		1 paket	Kec. Bangsal	Rp 4.000.000					
	Penyediaan Bahan/Material	-		Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll		1 paket	Kec. Bangsal	Rp 29.508.000					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	Kec. Bangsal	Rp 20.000.000					
	<b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	-	<b>B</b>	<b>Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Rp 355.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	-		Jumlah pengadaan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dapat terpenuhi	10 unit	Kec. Bangsal	Rp 355.000.000						
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	L	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana sesuai target</b>	<b>81%</b>	Kec. Bangsal	Rp <b>91.430.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Kec. Bangsal	Rp 38.000.000						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-		Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	3 orang	Kec. Bangsal	Rp 53.430.000						
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	L	<b>Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>	<b>81%</b>	Kec. Bangsal	Rp <b>87.500.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	-		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	Kec. Bangsal	Rp 37.500.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-		Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	Kec. Bangsal	Rp 30.000.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	Kec. Bangsal	Rp 20.000.000						
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	-		<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>81%</b>		Rp <b>24.000.000</b>						
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	-	L	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>1100 Pelayanan</b>	Kec. Bangsal	Rp <b>24.000.000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-		Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	550 Pelayanan	Kec. Bangsal	Rp 12.000.000					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-		Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	550 Pelayanan	Kec. Bangsal	Rp 12.000.000					
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-			<b>81%</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Rp 222.500.000</b>					
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	-	<b>L</b>	<b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b>	<b>49 fasilitasi</b>	<b>Kec. Bangsal</b>	<b>Rp 222.500.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Fasilitasi	Kec. Bangsal	Rp 17.500.000					
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Fasilitasi	Kec. Bangsal	Rp 37.000.000					
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	8 Fasilitasi	Kec. Bangsal	Rp 60.000.000					

				Umum									
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		17 Fasilitasi	Kec. Bangsal	Rp 108.000.000					
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>Rp 3.732.043.125</b>	-				





# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Bangsal Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bangsal, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Bangsal, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

### **1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Bangsal Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam rancangan awal Renja Kecamatan Bangsal diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak,

kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, Oktober 2021

**CAMAT BANGSAL**



**SUGENG NURYADI, S.IP.,MM.**

**Pembina**

**NIP. 19681010 198903 1 008**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".